

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Jepang telah menjalin hubungan diplomasi dengan India sejak Perang Dunia II. Hubungan diplomasi ini terjalin setelah ditanda tangannya perjanjian damai oleh kedua negara tersebut pada tahun 1952. Meskipun telah meresmikan hubungan diplomasi, tidak lantas membuat kedua negara tersebut menjadi sangat dekat, dikarenakan kedua belah pihak memiliki pandangan politik yang berbeda. Pada masa ini, politik luar negeri Jepang lebih banyak menaruh perhatian pada Amerika Serikat dari pada negara yang lain, termasuk India. India pun tidak memutuskan untuk membentuk aliansi dengan negara-negara lain karena masih berstatus sebagai negara baru merdeka. (Sanjana, 2013).

Pada tahun 1991, ketika India memiliki kebijakan untuk melakukan reformasi di bidang ekonomi yang dikenal dengan istilah '*Look east policy*' yaitu dengan meliberalisasikan sektor politik ekonominya, Jepang pun menaruh sedikit perhatian pada India dan memperkuat ikatan antara keduanya dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi. (Panda, 2014). Namun, merasa kerjasama ekonomi yang dijalin dengan India masih belum memuaskan. Akan tetapi beberapa perusahaan alat transportasi milik Jepang seperti Suzuki, Honda and Toyota mendapatkan keuntungan dengan kebijakan India yang meliberalisasikan sektor ekonominya. Walaupun demikian, kehadiran perusahaan-perusahaan Jepang tidak banyak mengubah minat Jepang pada India.

Kerjasama kedua negara ini sempat memburuk di tahun 1998-2000. (Khan S. A., 2013). Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang Hashimoto Ryutaro yang membuat kebijakan tegas atas tindakan India yang mencoba menyelenggarakan tes percobaan nuklir. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan mengurangi donor ODA (*Official Development Assistance*) ke India. Dan hubungan ini kembali membaik setelah kunjungan dari Perdana Menteri Yoshiro Mori, yang memanfaatkan dengan baik kunjungannya ke India sebagai ajang untuk memperbaiki hubungan kerjasama Jepang-India dengan program "*Global partnership*". (Panda, 2011). Tujuan dari program *Global Partnership* ini adalah untuk bekerjasama dalam bidang yang lebih luas, bukan hanya bidang ekonomi saja, bidang lain seperti keamanan dan pertahanan, perbaikan dalam infrastruktur juga termasuk dalam kerjasama tersebut.

Walaupun demikian, kerjasama Jepang dengan India khususnya dalam sedikit susah untuk berjalan lancar karena banyak berurusan dengan birokrasi dan peraturan yang kompleks, kemudian beberapa Yuridiksi, sulitnya membuat izin mendirikan perusahaan di India dan tidak memadainya infrastruktur, sehingga banyak investor dari Jepang yang menunda untuk bekerjasama. (The Economist, 2015). Dan menyebabkan jumlah FDI yang diberikan Jepang kepada India lebih sedikit di bandingkan dengan negara lain.

Shinzo Abe yang pernah menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2007, kembali terpilih menjadi perdana menteri pada tahun 2012. Pada awal masa kepemimpinannya, telah disuguhi bermacam-macam kasus yang harus segera diselesaikan. Salah satu kasus tersebut yaitu permasalahan melemahnya

ekonomi yang tengah melanda Jepang ditahun 2012. Ekonomi Jepang mengalami stagnansi selama kurang lebih dua dekade. Hal tersebut diperparah dengan krisis global yang dialami oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang keduanya merupakan pasar utama Jepang. Melemahnya ekonomi ini menyebabkan barang-barang dari Jepang lebih mahal sehingga permintaan ekspor produk Jepang menurun. (BBC, 2012). Akan tetapi Shinzo Abe telah memiliki rencana yang telah disampaikan saat masa kampanyenya bahwa Abe akan berusaha mengatasi permasalahan ekonomi di Jepang.

Di periode kedua dari kepemimpinan Shinzo Abe ini, terdapat perubahan dari hubungan Jepang-India yang kembali intens. Tidak seperti politik luar negeri Jepang sebelumnya, pada pemerintahan periode kedua di bawah kepemimpinan Abe ini, Jepang lebih memandang India sebagai mitra strategisnya. Untuk menunjukkan Jepang menjadikan India mitra strategis, berikut terdapat table perbandingannya.

Pada tahun 2012 Jepang memberikan investasi langsung pada bidang baru yaitu energi. Energi disini berupa pembangkit listrik tenaga nuklir dan juga menggunakan pembangkit lain yang lebih hemat, ramah lingkungan namun berteknologi modern. FDI yang diberikan pada bidang lain seperti otomotif, pelayanan, obat-obatan, dan mesin juga meningkat pada tahun 2012.

Pada tahun ini juga Jepang melakukan impor dari India berupa *rare earth* yaitu bahan baku material untuk industri Jepang. Impor rare earth baru dilakukan oleh Jepang pada tahun 2012, yang sebelumnya Jepang melakukan impor pada

negara China. Dan juga pemerintah India pada tahun 2012 membuat kebijakan berupa pembangunan pada infrastruktur negaranya secara besar-besaran.

Pada tahun sebelum 2012 India bukanlah mitra strategis bagi Jepang, dan mengalami perubahan pada tahun 2012. India yang di pandang sebagai mitra strategis bagi Jepang menciptakan pengaruh yang besar, yaitu meningkatnya kerjasama-kerjasama ekonomi.

Perdagangan yang dilakukan Jepang dan India seperti export dan import Alat Transportasi, Permata, Tekstil, Teknologi, Mesin, Mineral, Bahan mentah seperti bijih besi, dan alat-alat farmasi. (K.V., 2003). Perdagangan Jepang pada India mengalami peningkatan pada ekspor-impor dari tahun 2012 hingga 2015.

Selain perdagangan, investor-investor dari perusahaan Jepang banyak menanamkan *foreign direct investment* di India. FDI dari Jepang banyak masuk ke sektor manufaktur seperti otomotif, obat-obatan atau farmasi, pelayanan, mesin, elektronik dan yang baru-baru ini menjadi perhatian Jepang yaitu bidang energy.

Selain itu India merupakan negara yang menduduki peringkat sebagai negara tujuan investasi perusahaan Jepang. Survey tersebut diselenggarakan oleh JBIC ini memiliki bukti berupa meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan Jepang yang ingin memasuki negara India dan mendirikan cabang perusahaan atau sekedar berinvestasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan. Sehingga penulis menetapkan pertanyaan pokok sebagai rumusan masalah penelitian, yaitu:

- Mengapa Jepang menjadikan India sebagai mitra strategisnya pada tahun 2012-2015?

C. Kerangka Pemikiran

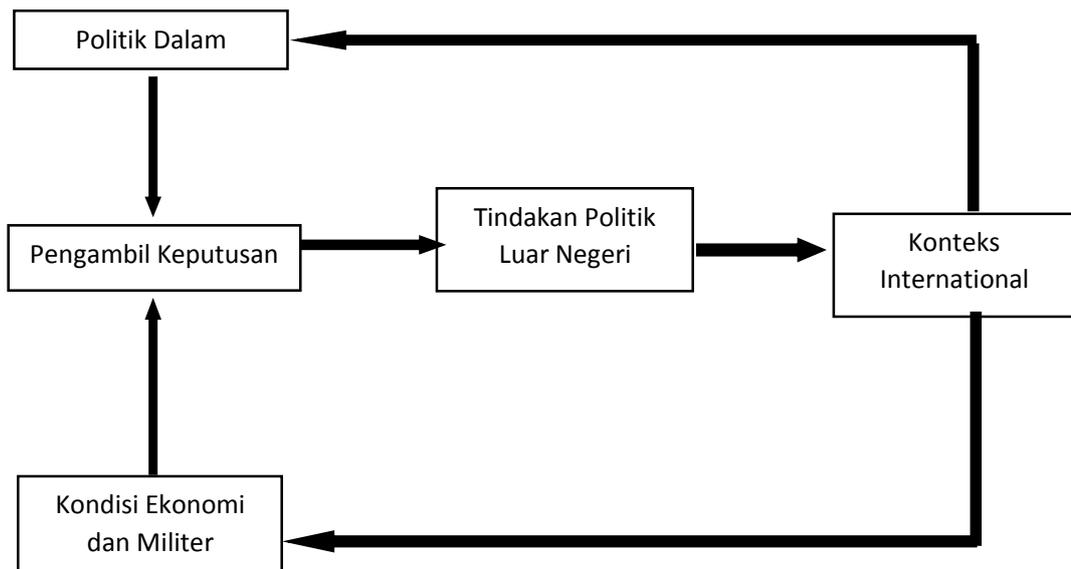
Sebagai pedoman bagi Penulis untuk mempermudah melakukan penelitian dan analisis yang ada serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan terhadap objek penelitian dan meluasnya pembahasan ke arah yang tidak signifikan, maka Penulis mencoba mengajukan kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian tentang motif Jepang dalam menjadikan India sebagai mitra strategisnya pada tahun 2012-2015. Dalam penelitian ini Teori dan Konsep sangat di perlukan guna menganalisa dan memecahkan masalah. Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis yaitu:

1. Decision Making Process

Penulis akan menggunakan pendekatan teori pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Sebagai upaya dalam menjelaskan beberapa proses pengambilan keputusan luar negeri dengan beberapa hal yang

mempengaruhinya. Berikut adalah model teori pembuatan kebijakan politik luar negeri:

Bagan 1.0.1 Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar negeri



Tabel di atas merupakan tabel Politik Luar negeri Menurut William D. Coplin. Pembuatan sebuah kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu Politik dalam negeri, Pengambil Keputusan, Kondisi ekonomi dan militer, dan faktor dari eksternal atau konteks internasional.

Pada Politik dalam negeri terdapat banyak sekali yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan seperti yang pertama adalah birokrasi yang memiliki peran penting yaitu sebagai penyalur informasi-informasi kepada pengambil keputusan dan sebagai pelaksana kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pengambil keputusan.

Sedikit memiliki kemiripan dengan birokrasi yang kedua adalah Partai politik. Memiliki fungsi sebagai penyalur informasi dua arah yaitu menyampaikan tuntutan-tuntutan masyarakat kepada para pengambil keputusan terkait kebijakan yang dibuat. Partai politik dapat mempengaruhi sebuah kebijakan namun memiliki batasan yaitu sebelum sebuah kebijakan dikeluarkan.

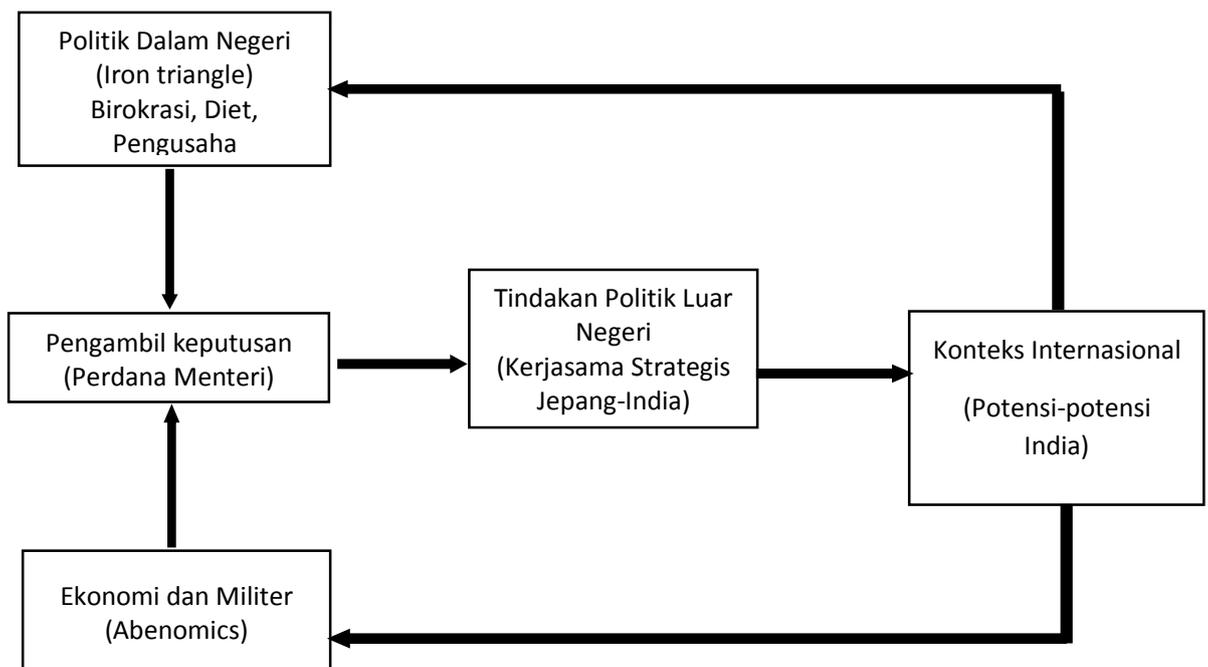
Dan yang ketiga adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau *interest group*. Organisasi atau kelompok informal ini bergabung bersama dan memiliki tujuan tertentu. Kelompok ini memiliki peran yang besar karena dibelakang mereka terdapat sumber-sumber yang berfinansial besar seperti organisasi lingkungan yang bermarkas di luar negeri dan memiliki banyak massa atau pengusaha-pengusaha dengan cabang perusahaan di berbagai negara. Dan yang terakhir adalah massa, di sebuah negara pasti memiliki massa yang banyak sehingga dengan banyaknya suara opini masyarakat tentu berperan penting dengan kebijakan yang dibuat, jika massa tidak puas dengan sebuah kebijakan yang telah dibuat maupun yang baru direncanakan. Massa dapat menggunakan pers seperti televisi, radio, Koran, sosial media sebagai aksi protes masyarakat.

Kondisi militer dan ekonomi memiliki peran khusus dalam mempengaruhi sebuah kebijakan. Negara akan diakui kekuatannya jika memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus dan stabil. Meskipun sekarang bukanlah era peperangan tiap-tiap negara pasti berlomba untuk melengkapi negaranya dengan alat-alat militer yang canggih dan juga tentara yang

tanggung. Sebuah negara yang memiliki keduanya tidak akan dianggap remeh sehingga akan disegani atau mungkin ditakuti oleh negara lain. Faktor yang terakhir adalah konteks internasional berupa tindakan dari luar lingkungan international. Kebijakan yang dipengaruhi oleh konteks luar negeri dapat berupa geografis, ekonomi, dan politik. Faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas saling mempengaruhi sebuah kebijakan yang dibuat. (Coplin, 2003)

Bagan 1.0.2 Operasionalisasi Empat determinan yang Mempengaruhi Tindakan Politik Luar

Negeri



Dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri terdapat aktor-aktor penting Jepang seperti *Iron Triangle* yang merupakan bentuk kerjasama antara birokrasi, diet dan pengusaha. Ketiga aktor tersebut saling memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang akan dibuat. Dalam kelompok birokrasi terdapat dirjen-dirjen yang mengurus segala sesuatu

seperti administrasi dan juga surat-surat penting, kemudian membentuk rapat dengan menteri-menteri penting yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Seperti MOFA (The Minister of Foreign Affairs), METI (The Minister of Trade International) dan MOF (The Minister of Finance) menteri-menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri ini memberi informasi yang penting terkait dengan situasi dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam kelompok Diet terdapat dua Majelis yaitu majelis rendah dan majelis tinggi, tempat tersebut berisi mayoritas dari orang-orang partai yang memenangkan suara dalam pemilu. Partai yang mendominasi kursi diet dengan mudah dapat menjalankan kebijakan yang mereka inginkan. Selain itu ada kelompok kepentingan yang dalam sistem pemerintahan Jepang yaitu kelompok pengusaha, pengusaha sangat berpengaruh dalam pemerintahan sebab pengusaha Jepang menyumbangkan dana untuk partai sehingga kemudian mereka mendapat kompensasi dari kebijakan yang dibuat pemerintah berupa penurunan pajak yang mereka bayar.

Ekonomi dan militer Jepang merupakan faktor yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat. Ekonomi Jepang yang sedang mengalami stagnasi namun juga menguatnya nilai tukar yen membuat pemerintah menerapkan kebijakan dalam negeri untuk mengatasi masalah ekonomi yang mempengaruhi politik luar negerinya. Artikel 9 yang berisi larangan bagi Jepang untuk memiliki pasukan militer membuatnya menjadi negara yang hanya memperhatikan sektor ekonomi, namun setelah

menemui konflik yang tidak dapat diprediksi membuat Jepang mengusahakan untuk merevisi artikel tersebut.

Jika diatas telah dijelaskan tentang faktor dalam negeri, tentunya terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi suatu politik luar negeri. Dalam hal ini Jepang melihat India memiliki potensi yang sangat bagus yang dapat membantunya mengatasi permasalahan negaranya dan tentunya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

D. Hipotesa

Dari penjelasan konsep dan teori diatas, Penulis memberikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang di kemukakan di atas. Yaitu: Penyebab Jepang menjadikan India sebagai mitra strategisnya pada tahun 2012-2015.

1. Kondisi ekonomi Jepang, dilihat dari stagnasi ekonomi yang dialami Jepang
2. Konteks internasional, berupa potensi-potensi ekonomi India.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mengenai penyebab politik luar negeri Jepang yang menjadikan India sebagai mitra strategis di bidang perekonomian.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian agar lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis telah membatasi kajian pada persoalan faktor yang membuat Jepang menjadikan India sebagai mitra strategisnya dengan di mulainya penelitian pada tahun 2012 ketika Shinzo Abe terpilih kembali menjadi PM Jepang periode dua. Jepang yang pada awalnya belum

memiliki ketertarikan yang besar terhadap kemudian mulai mengubah tindakan politik luar negerinya terhadap India dengan menjalin kerjasama dan menjadi lebih dekat. Dibawah pimpinan Shinzo Abe kerjasama jepang-India makin meningkat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Data

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif (deskriptif), yang bertujuan untuk membuat deskripsi, penjelasan atau gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sementara itu, data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk-bentuk yang tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan permasalahan yang sedang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan baik berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, hasil diskusi ilmiah, laporan media, artikel-artikel resmi pemerintah dan laporan lembaga-lembaga internasional mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna mempermudah penyusunan bahasan dan uraian-uraian.

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang, Rumusan masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesa, Tujuan penelitian, Jangkauan penelitian, Metodologi, Sistematika penulisan.

BAB II penulis akan mendeskripsikan tentang landasan politik luar negeri Jepang. Berawal dari sejarah penguasa Jepang hingga masa Meiji, kemudian juga struktur pemerintahan Jepang. Aktor-aktor yang dapat mempengaruhi kebijakan politik luar negeri dan juga dijelaskan arah politik luar negerinya paska Perang Dunia II.

BAB III Penulis akan membahas tentang masalah perekonomian di Jepang yang turut mempengaruhi politik luar negeri. Jepang menemukan potensi yang cukup menarik dari negara India sehingga tercipta kebijakan luar negeri berupa kerjasama ekonomi yang ditawarkan Jepang terhadap India. Kerjasama ekonomi kedua negara sering mengalami naik turun sejak awal kerjasama tersebut dilaksanakan.

BAB IV akan membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki negara India sehingga menarik perhatian Jepang untuk berusaha menawarkan kerjasama. Dalam kerjasama ini merupakan bagian dari kepentingan dalam negeri Jepang yang berasal dari strategi ekonomi dalam negeri akibat dari

stagnasi ekonominya, Jepang memanfaatkan pasar India yang besar dengan produk-produk unggulannya dan juga persaingan dengan China.

BAB V berisi tentang Kesimpulan dari pembahasan-pembahasan bab sebelumnya.